

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh pendidikan dan pelatihan akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja bendahara pengeluaran. (studi pada Pemerintah Daerah Kota Kupang) disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan akuntansi keuangan daerah secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang. Hal ini dapat dilihat dari tingkat koefisien variabel pendidikan sebesar 0.103 dengan signifikan 0,025. Berpengaruhnya variabel pendidikan akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja bendahara pengeluaran dapat disimpulkan dengan berdasarkan presentasi jawaban responden untuk indikator pendidikan sebesar 83,3% dengan kategori baik.
2. Pelatihan akuntansi keuangan daerah secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja bendahara pengeluaran. Hal ini dapat dilihat dari tingkat koefisien sebesar 0,863 dengan tingkat signifikansi 0,00 serta persentasi total jawaban responden terhadap indikator pelatihan sebesar 63,82%, angka ini dapat menunjukkan hubungan dan pengaruh yang besar dari pelatihan akuntansi terhadap kinerja bendahara pengeluaran pada

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kupang dengan sampel 40 orang.

3. Pendidikan dan pelatihan akuntansi keuangan daerah secara signifikan berpengaruh dilihat dari hasil uji F menunjukkan secara bersama-sama variabel pendidikan akuntansi keuangan daerah (X1) dan variabel pelatihan akuntansi keuangan daerah (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja bendahara pengeluaran, dan dapat dilihat dari hasil jawaban responden terutama pada item pernyataan tentang pendidikan akuntansi yaitu 83,3% dengan kategori baik dan pelatihan akuntansi sebesar 63,82% dengan kategori baik. Dengan melihat presentasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pendidikan akuntansi keuangan daerah dan pelatihan akuntansi keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja bendahara pengeluaran.

6.2 Saran

Saran yang disampaikan sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Kupang hendaknya menempatkan jabatan bendahara pengeluaran kepada mereka yang berpendidikan S1 akuntansi sehingga relevan dengan tugas dan fungsi bendahara pengeluaran. Sehingga dalam proses penatausahaan keuangan dilaksanakan dengan

lancar, tertib, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan- peraturan yang berlaku.

2. Perlunya pelatihan yang berkelanjutan bagi bendahara pengeluaran sehingga meningkatkan pengetahuan serta pengalaman kerja, bagi para bendahara pengeluaran sebab banyak peraturan akuntansi yang berubah dan penggunaan teknologi dalam penyusunan laporan keuangan dengan sistem lebih canggih.
3. Bagi bendahara pengeluaran yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, oleh atasan dilakukan evaluasi atau monitoring terhadap bendahara pengeluaran tersebut terkait hasil dari pendidikan dan latihan yang telah mereka ikuti agar kemampuan pegawai dapat terukur serta memberikan promosi kerja kepada pegawai tersebut sehingga kinerja mereka akan lebih baik.
4. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan penelitian yang sama, jika akan menggunakan skripsi sebagai referensi, sebaiknya perlu dikaji kembali, karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pernyataan-pernyataan yang belum atau kurang sesuai, saya sebagai penulis merasa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham, 2016. *Manajemen Pengambilan Keputusan (teori dan aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis multivariate dengan program spss*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hani, Handoko. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Bumi Akasara*. Yogyakarta: Andi.
- Kasmir, 2011. *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sector Public*. Yogyakarta: Upp STIE YPKN.
- Nurlaila. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ternate: Penerbit Lepkhair.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 *Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Keuangan*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 *Tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Riduwan, 2005. *Dasar Dasar Statitika*, Bandung : Alfabeta.
- Sumarsono, S. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YPKN.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Tjiptono, F dan Anastasia. 2003. *Total Quality Management*. Yogyakarta